

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus Di Desa Koto Taluk)

Maulana Irfan

Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

Email : MaulanaIrfan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Masa Pandemi Covid (Studi Kasus di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi). Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Masa Pandemi Covid (Studi Kasus di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi). Teknik penarikan sampel untuk pemerintah desa menggunakan teknik *Sampling* jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang berjumlah 16 responden, dan untuk masyarakat digunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, yang berjumlah 44 responden. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Masa Pandemi Covid (Studi Kasus di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi) yang menghasilkan nilai rata-rata 156 berarti berada pada interval Cukup Baik. Serta observasi lapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Koto Taluk ini, karena berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat sudah cukup baik.

Kata Kunci : Partisipasi, Pembangunan

Abstract

This research was conducted in Koto Taluk Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to find out how the community's participation in village development during the Covid pandemic (a case study in Koto Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency) was carried out. The formulation of the problem in the research is How Community Participation in Village Development During the Covid Pandemic (Case Study in Koto Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency). The sampling technique for the village government uses the saturated sampling technique, ie all the population is sampled, totaling 16 respondents, and for the community using Simple Random Sampling, which is taking sample members from the population at random without regard to the strata that exist in the population, which amount to 44 respondents. Analysis of the data used is descriptive quantitative, namely analyzing the data obtained from the results of distributing questionnaires. The results showed Community Participation in Village Development During the Covid Pandemic Period (Case Study in Koto Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency) which resulted in an average value of 156 meaning it was in a Good Enough interval. As well as field observations which show that community participation in development in Koto Taluk Village is quite good, because based on the indicators used in this study, community participation is quite good.

Keywords : Participation, Development

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusia handal dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai *self governing community* (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri). Perencanaan Partisipasi masyarakat sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa. Dengan partisipasi masyarakat desa kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri akan lebih cepat. Keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tolak ukur keberhasilan awal proses perencanaan partisipatif. Dan ini harus senantiasa di tumbuh kembangkan di tingkat desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memiliki sumber dana yang cukup besar untuk kemandirian masyarakat desa. Dana tersebut berasal dari tujuh sumber pendapatan yakni : APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, pajak dan retribusi, bantuan keuangan dari Provinsi/ Kabupaten dan Kota, hibah yang sah dan tidak mengikat.

Perencanaan pembangunan dan pelaksanaan harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan ditingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah semakin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses Musrenbang.

Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi taraf kondisi dan taraf hidup masyarakat desa. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemauan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat di dalam pembangunan dapat membutuhkan sebuah kemampuan masyarakat dalam sebuah pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, persepsi yang fundamental pembangunan masyarakat adalah peningkatan partisipasi demokrasi, dengan demikian, partisipasi tidak hanya ikut-ikutan tetapi, melainkan mengambil kepentingan masyarakat terutama pada masyarakat perdesaan. Didesa Koto Taluk Bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu belanja yang digunakan untuk pembangunan desa seperti perbaikan saluran irigasi, perbaikan jalan, dan lain sebagainya.

Perencanaan pembangunan haruslah melibatkan masyarakat, harus ada partisipasi masyarakat didalam proses pembangunan untuk dapat merealisasikan program pembangunan. Musrenbang desa merupakan forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan secara partisipatif untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa/kampung. Dalam

musrenbang kampung, pemerintah kampung dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa

Partisipasi masyarakat dalam proses perenanaan pembangunan sangat penting dikarenakan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Sebab, merekalah yang menegetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Merekalah nantinya yang memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut. Jadi, untuk tercapainya keberhasilan pembagunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat.

Sebelum adanya pembangunan, badan permusyawaratan desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal – hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam setahun dan biasa dinamakan dengan Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan perwakilan masyarakat. Hasil musyawarah yang dilakukan merupakan segala aspirasi, karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, dan kebutuhan masyarakat, selain itu dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah akan timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa.

Peranan masyarakat sangatlah penting karena dalam perencanaan pembangunan, masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dapat mengkombinasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Sebagai akibat dari kurang aktifnya masyarakat dalam proses musrenbang sehingga daftar prioritas rencana pembangunan kampung yang seharusnya diajukan langsung oleh masyarakat cenderung diambil alih oleh para elit pemerintahan desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan hal ini dikarenakan sebagian masyarakat enggan hadir mengingat masih maraknya kasus covid 19 di kabupaten kuantan singingi. Intinya dari hasil observsi penulis dilapangan menemukan beberapa fenomena :

1. Pada pandemi Covid 19 ini mengakibatkan Kurangnya partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, karena sebagian masyarakat enggan hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini dikarenakan kekhawatiran terhadap virus Covid 19 ini.
2. Begitupun Sebelum dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terlebih dahulu melaksanakan rapat antar dusun untuk menampung aspirasi masyarakat perdusun, namun partisipasi masyarakat masih kurang.
3. Padahal upaya pemerintah desa yaitu dengan memberikan undangan kepada masyarakat untuk dapat hadir pada rapat tersebut, namun partisipasi masyarakat masih kurang untuk ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Koto Taluk.
4. Banyak pembangunan yang tidak terealisasi karena dana lebih banyak digunakan untuk bantuan sosial covid 19.

Berdasarkan Hasil Observasi penulis dilapangan tersebut terlihat bahwa partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa koto taluk sangat kurang, oleh karena itu penelitian ini sangat penting mengingat bagaimana sebenarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Koto Taluk, dan peneliti mengambil judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan *pe* dan akhiran *pa* pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mncapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat dalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lainnya. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi secara luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang teratur dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber. (Siagian, 2001 : 38).

Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo De Groot Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hokum. (dalam Syafiie, 2010 : 22)

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai basic process of administration, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).

Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008 : 36-38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).
Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.
- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.
Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.
- c. Administrasi negara mempunyai prioritas.
Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.
- e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.
- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara. Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti Government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan public (Suharto, 2008 : 3).

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah)Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

2.1.3 Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warganegara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya. Sumbangan inisiatif dan kreatifitas dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan, baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam rapat kelompok atau pertemuan itu, akan saling memberi informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi dalam partisipasi terdapat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara sesama anggota masyarakat

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama. (Sumaryadi: 2010:46)

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, secara lengkap dikemukakan oleh Mubyarto (dalam Sumaryadi, 2010:49). Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut oleh karena itu;

- a. Kegiatan sasaran pembangunan masyarakat, yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, pembangkitan partisipasi masyarakat, dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri, melainkan diusahakan agar yang satu berkaitan dengan yang lain, sehingga ketiganya dapat dianggap sebagai satu paket usaha.
- b. Peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat, dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat.
- c. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
- d. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri terdapat hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian bisa membangun desanya dengan atau tanpa partisipasi vertikal dengan pihak lain.
- e. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya.

Partisipasi secara umum merupakan peran serta atau keikutsertaan/keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal, dikatakan oleh Mikkelsen (2011:56) bahwa dibutuhkan pendekatan yang mensinergikan potensi masyarakat. Pendekatan ini memerlukan perencanaan matang yang mendorong peran serta aktif masyarakat.

Huraerah (2008:117) membagi partisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

5. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia

2.1.4 Teori Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (PP Nomor 6 Tahun 2014)

Berdasarkan peraturan pemerintah, Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut (Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2) :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan

2.1.5 Teori Pembangunan

Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula kearah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. Menurut Siagian(2001:4) administrasi pembangunan meliputi dua pengertian,yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri (2006:15) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar,apabila disertai dengan administrasi yang baik.

pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama, contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro 2010 : 20)

Musrenbang merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan. Tinjauan umum Musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan daerah. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada setiap tahapan Musrenbang, mulai dari Musrenbang Kelurahan/Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum RKPd, dan Musrenbang

Daerah, serta menyepakati prioritas pembangunan dan program/kegiatan pada setiap tahapan Musrenbang.

Musrenbang dari awal dibentuk dengan harapan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat agar pendapat dan usulan masyarakat terhadap perencanaan program-program pembangunan yang ada di daerahnya dapat difasilitasi di dukung dan diakomodir oleh pemerintah daerah beserta masyarakat itu sendiri dan komponen yang lain. Dalam Musrenbang Desa, Kepala Desa dan unsur-unsur Desa lainnya sebagai pihak penyelenggaraan Musrenbang memberikan undangan kepada peserta-peserta Musrenbang yang ada di Desa/Kelurahan tersebut

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017 : 7)

Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri. (Sugiyono, 2017 : 35)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8)

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Masa Pandemi Covid 19 di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner didapat angka secara rata-rata adalah 156 dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi). termasuk pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 121 – 180.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sudah cukup baik, terlihat dengan kehadiran masyarakat yang cukup banyak meski di saat Pandemi Covid 19, Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan. Kehadiran/ partisipasi masyarakat desa Koto Taluk saat menghadiri Rapat, pemerintahan desa mengusahakan agar kehadiran masyarakat menghadiri Rapat Untuk Pembangunan Desa melalui pemberitahuan/himbauan melalui mesjid dan pemberitahuan /himbauan melalui undangan untuk menghadiri rapat, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan masyarakat ini, Pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan pembangunan desa ini, oleh karenanya pemerintah desa mengupayakan agar masyarakat berpartisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.

Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembangunan di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini sudah cukup baik meskipun Masa Pandemi Covid 19, hal ini terlihat pada saat akan melaksanakan suatu pembangunan, pemerintah Desa Koto Taluk selalu berusaha melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Pemerintah mengupayakan partisipasi dari masyarakat yang dilakukan dengan memberikan himbauan mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan desa, melalui penyebaran informasi dan

sosialisasi ataupun himbauan-himbauan melalui pemerintah desa atau mesjid atau musholah terdekat untuk memberitahukan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan, agar diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya, pelaksanaan ini dapat berupa Kontribusi dari masyarakat berbetuk kontribusi Dengan Uang, Kontribusi dari masyarakat berbetuk kontribusi Dengan Bahan (*Material*), kontribusi dari masyarakat berbetuk kontribusi tenaga atau keikutsertaan masyarakat dengan terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta memberi masukan-masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan pembangunan desa yang sedang dilaksanakan.

Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi untuk Pembangunan di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik meskipun Masa Pandemi Covid 19, dimana pemerintah terbuka atas kritikan dan masukan oleh masyarakat mengenai pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, dan pemerintah disaat rapat juga membuka sesi evaluasi serta masyarakat dapat memberikan saran dan kritiknya, masyarakat tidak terlalu aktif dalam memberikan masukan dan kritikan yang membangun untuk pembangunan desa. Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan kritik/koreksi terhadap jalannya pembangunan terlihat dengan kurang aktifnya masyarakat dalam memberikan kritikan yang membangun apabila ada pembangunan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Serta tidak terlalu aktifnya Partisipasi Masyarakat Desa Koto Taluk dalam Memberikan saran terhadap jalannya pembangunan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat menyampaikan masukan-masukan atas pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa tentu berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat dan diputuskan saat rapat, dan masyarakat kurang aktif dalam memberikan penilaian terhadap hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Koto Taluk ini

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup Baik meskipun Masa Pandemi Covid 19, dan berdasarkan observasi dilapangan bahwa memang Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini sudah cukup baik, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa untuk mengupayakan partisipasi dari masyarakat agar merasakan manfaatnya, pembangunan yang dilakuka pemerintah desa koto taluk dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat, agar pemanfaatan hasil pembangunan di desa Koto Taluk dirasakan oleh masyarakat desa Koto Taluk itu sendiri, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa benar-benar atas dasara aspirasi dari masyrakat desa koto taluk ini yang mana diharapkan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di desa Koto Taluk yang dirasakan oleh masyarakat desa Koto Taluk itu sendiri, serta pembangunan yang telah dilakukan diharapkan Partisipasi Masyarakat Desa Koto Taluk dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan yang ada di Desa Koto Taluk ini.

5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi) yang menghasilkan nilai rata-rata 156 berarti berada pada interval Cukup Baik. Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Koto Taluk ini, karena berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat sudah cukup baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tiada henti Penulis untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak

tergantikan hingga saya selalu kuat semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani Studi, Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi serta selaku pembimbing II, Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing I, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatis menuju redefinisi*. Jakarta, Raja Grafindo
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung.
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya manusia*. PT Bumi. Aksara : Jakarta.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM. YKPN
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Mulyadi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit In Media. Jakarta
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. UMM Press : Malang
- Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi 2020
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. PT. Refika Aditama : Bandung
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sondang P. Siagian. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Binapura Aksara : Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta
- Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers. Jakarta
- Tohardi, Ahmad 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*., Universitas Tanjung Pura, Mandar Maju, Bandung
- Sumber lain :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tgl/Bln/Th WAKTU
16/11/22 09:11

LOKASI : KCP - TELUK KHIANTAN

NO. REF : FT22320NCZV8

BUKTI SETORAN TINJAU

REK. NO: 7070756328

NAMA REK: UNIVERSITAS ISLAM KHIANTAN
SINGINGI

SETORAN: Rp. 200,000.00

TERBILANG: Dua Ratus Ribu Rupiah

BERITA : MAULANA IRFAN 170411036

Teller


DESRI CANDRA

Pemohon
(Applicant)


Nama :
Telp :

Dengan ditandatanganinya bukti transaksi ini maka pemohon setuju atas data transaksi yang tertera di atas dan oleh karenanya membebaskan Bank Syariah Indonesia serta pegawainya atas tuntutan berupa apapun dari pihak manapun sehubungan dengan transaksi ini.

By signing on this receipt, applicant agrees of the transaction data stated and due to that releases Bank Syariah Indonesia and its employees from any claims by any parties.